

USULAN RENJA TA.2025							
DIVISI	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Volume / Target 2025	Satuan	Keterangan/ Formula
		115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU				
	Provinsi &	5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
		5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		1	Layanan,	
		5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan		1	Layanan	
			Indikator RO :				
			01 Jumlah penanganan pelanggaran dan		1	Layanan	-layanan audit internal
			Komponen Input :				
Penanganan	Provinsi	201	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan	Jumlah laporan	1	Laporan	1. Laporan pembinaan/pendampingan ke
Hukum dan	Provinsi	202	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian	Jumlah laporan	1	Laporan	1. Laporan pembinaan/pendampingan ke
Penanganan	kab/kota	301	Koordinasi penanganan pelanggaran	Jumlah laporan semesteran	12	Laporan	1. Laporan koordinasi kab/kota
Hukum dan	kab/kota	302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses	Jumlah laporan semesteran	12	Laporan	1. Laporan koordinasi kab/kota
		5245.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur.	
		5245.BIC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan		5	Laporan	
			Indikator RO :				
			01 Jumlah laporan Hasil Pengawasan Pemilu dan Pengawasan Siber Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		5	Laporan	-layanan audit internal
			Komponen Input :				
Pencegahan, Parmas, dan Humas	Provinsi	201	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait.	1	Laporan	-laporan semester
Pencegahan, Parmas, dan Humas	Provinsi	202	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	1	Laporan	
Pencegahan, Parmas, dan Humas	Provinsi	203	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 12)
Pencegahan, Parmas, dan Humas	kab/kota	301	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait.	6	Laporan	-laporan semester
Pencegahan, Parmas, dan Humas	kab/kota	302	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	6	Laporan	
Pencegahan, Parmas, dan Humas	kab/kota	303	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	6	Laporan	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 12) -1 laporan@514 KK
		5245.BIC.002	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Provinsi		22	Laporan	Pilkada Serentak Provinsi
			Indikator RO :				
			01 Jumlah laporan hasil pengawasan Pilkada Serentak di Provinsi		32	Laporan	-layanan audit internal
			Komponen Input :				

	Provinsi		201	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah pembayaran Honorarium Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Provinsi		202	Honorarium Kesekretariatan	Jumlah pembayaran Honorarium Sekretariat Pengawas Pemilihan	1	Laporan	
	Provinsi		203	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan	
	Provinsi		204	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Jumlah pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	1	Laporan	
	Provinsi		205	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah penyelenggaraan dukungan fasilitasi perencanaan, program dan anggaran tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Provinsi		206	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah pemenuhan Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor bagi Pengawas Pemilihan	1	Laporan	
	Provinsi		207	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	Jumlah pemenuhan kendaraan operasional dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Provinsi		208	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang mendapatkan fasilitas pemeliharaan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Provinsi		209	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah pemeliharaan dan bahan bakar minyak yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Provinsi		210	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah pemenuhan Operasional pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	

	Provinsi		211	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah laporan hasil Pembentukan Panwaslu Ad-Hoc	1	Laporan	
	Provinsi		212	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Pengawas Pemilihan yang dibentuk dan dilantik serta diberikan penguatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Provinsi		213	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah laporan advokasi dan pendampingan hukum dalam penyelesaian perkara pada pengawasan Pemilihan	1	Laporan	
	Provinsi		214	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Provinsi		215	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah laporan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan	
	Provinsi		216	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah laporan Musyawarah Penyelesaian Sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Provinsi		217	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah laporan Penindakan Pelanggaran Administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Provinsi		218	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah laporan Fasilitasi Sentra Gakkumdu dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Provinsi		219	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah laporan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	

	Provinsi		220	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah laporan Koordinasi dengan Stakeholder dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Provinsi		221	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah laporan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Provinsi		222	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	Jumlah laporan Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
		5245.BIC.003 s.d 009	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 1 s.d			1	Laporan	Pilkada Serentak Kabupaten/Kota
			Indikator RO :					
			01	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 1 s.d laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 35		1	Laporan	-layanan audit internal
			Komponen Input :					
	Kabupaten/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah pembayaran Honorarium Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Kabupaten/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	Jumlah pembayaran Honorarium Sekretariat Pengawas Pemilihan	1	Laporan	
	Kabupaten/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan	
	Kabupaten/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Jumlah pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	1	Laporan	

	Kabupaten/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah penyelenggaraan dukungan fasilitasi perencanaan, program dan anggaran tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Kabupaten/Kota		306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah pemenuhan Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor bagi Pengawas Pemilihan	1	Laporan	
	Kabupaten/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	Jumlah pemenuhan kendaraan operasional dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Kabupaten/Kota		308	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang mendapatkan fasilitas pemeliharaan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Kabupaten/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah pemeliharaan dan bahan bakar minyak yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Kabupaten/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah pemenuhan Operasional pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Kabupaten/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah laporan hasil Pembentukan Panwaslu Ad-Hoc	1	Laporan	
	Kabupaten/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Pengawas Pemilihan yang dibentuk dan dilantik serta diberikan penguatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	

	Kabupaten/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah laporan advokasi dan pendampingan hukum dalam penyelesaian perkara pada pengawasan Pemilihan	1	Laporan	
	Kabupaten/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Kabupaten/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah laporan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan	
	Kabupaten/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah laporan Musyawarah Penyelesaian Sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Kabupaten/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah laporan Penindakan Pelanggaran Administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Kabupaten/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah laporan Fasilitasi Sentra Gakkumdu dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Kabupaten/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah laporan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Kabupaten/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah laporan Koordinasi dengan Stakeholder dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
	Kabupaten/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah laporan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	

	Kabupaten/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitas Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	Jumlah laporan Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitas Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	
		115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
		4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL					
		4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			10	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	
		4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja			10	Dokumen	
			Indikator RO :					
			01	Level Maturitas SPIP		3	Level	-layanan audit internal
			Komponen Input :					
SDM, Organisasi, dan Diklat	Provinsi		201	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	4	Dokumen	
SDM, Organisasi, dan Diklat	Kab/kota		301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	6	Dokumen	
		4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI					
		4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			4	Layanan,	
		4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			2	Laporan	
			Indikator RO :					
			01	Persentase dukungan publikasi dan dokumentasi pemberitaan Bawaslu		100	%	-layanan audit internal
			Komponen Input :					

Pencegahan, Parmas, dan Humas	Provinsi		201	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1	Laporan	Keterbukaan informasi publik (Indikator IKU) 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu provinsi 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi ke Kab/Kota
Pencegahan, Parmas, dan Humas	Kab/kota		301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	6	Laporan	1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu Kab/Kota
		4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi			2	Laporan	
			Indikator RO :					
			01	Nilai Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)		Baik	Predikat Nilai(2,6-3,5)	Layanan audit internal
			Komponen Input :					
Penanganan Pelanggaran dan Datin	Provinsi		201	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1	Laporan	1 laporan akhir PPID; 1 laporan data dan informasi (mencakup infrastruktur dan sistem informasi).
Penanganan Pelanggaran dan Datin	Kab/kota		301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID	6	Laporan	1 laporan akhir PPID
		6849	PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM					
		6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			7	Layanan, Laporan, Dokumen	
		6849.EBA.956	Layanan BMN			7	Layanan	
			Indikator RO :					
			01	Kualitas Pengelolaan Aset		3	Skala	Layanan audit internal
			Komponen Input :					
SDM, Organisasi, dan Diklat	Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan	1. Laporan inventarisasi aset persemester 2. Laporan SIMAK BMN persemester 3. Laporan Pembinaan (bimtek) pengelolaan BMN 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan BMN ke Kab/Kota

SDM, Organisasi, dan Diklat	Kab/kota		301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	6	Laporan	Semesteran
		6849.EBA.994	Layanan Perkantoran			1	Layanan	
			Indikator RO :					
			01	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Bawaslu		100	%	-layanan audit internal
			Komponen Input :					
Operasional	1. Provinsi; 2. Kab/Kota		001	Gaji dan tunjangan	Jumlah Unit Kerja pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	7		
	Provinsi/Kab/kota		BA)	Gaji dan tunjangan Provinsi/Kab./Kota				
Operasional	1. Provinsi; 2. Kab/Kota		002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	7		
	Provinsi/Kab/kota		BA)	Operasional dan pemeliharaan kantor Provinsi/Kab./Kota				
		6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			8	Dokumen, Layanan, Laporan	
		6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			2	Dokumen	
			Indikator RO :					
			01	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan dan Penganggaran Bawaslu		100	%	-layanan audit internal
			Komponen Input :					
SDM, Organisasi, dan Diklat	Provinsi		201	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1	Dokumen	1. Dokumen Renja dan Renja Perubahan 2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) dan revisi anggaran
SDM, Organisasi, dan Diklat	Kab/kota		301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	6	Dokumen	
		6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			2	Dokumen	
			Indikator RO :					
			01	Nilai Evaluasi SAKIP Bawaslu		70	Nilai	-layanan audit internal
			Komponen Input :					
SDM, Organisasi, dan Diklat	Provinsi		201	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1	Dokumen	1. Dokumen SAKIP (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja dan perjanjian kinerja perubahan, Rencana Aksi, LKIP, SK-IKU) 2. Laporan Rencana Penyerapan Anggaran per triwulan 3. Laporan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kinerja sesuai dengan rencana aksi, RKA, dan dokumen perencanaan lainnya 4. Laporan supervisi dan monitoring pelaksanaan program ke Kab/Kota

SDM, Organisasi, dan Diklat	Kab/kota		301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	6	Dokumen	
		6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan			2	Dokumen	
			Indikator RO :					
			01	Kualitas Pengelolaan Anggaran (IKPA)		90	Nilai	-layanan audit internal
			Komponen Input :					
SDM, Organisasi, dan Diklat	Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1	Dokumen	1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran bulanan 2. Laporan keuangan semesteran
SDM, Organisasi, dan Diklat	Kab/kota		301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	6	Dokumen	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran pembantu bulanan
		6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu			2	Dokumen	
			Indikator RO :					
			01	Kualitas Pengelolaan Arsip		70	Nilai	-layanan audit internal
			Komponen Input :					
SDM, Organisasi, dan Diklat	Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen	
SDM, Organisasi, dan Diklat	Kab/kota		301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	6	Dokumen	
		6850	PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM					
		6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			10	Layanan, Laporan, Dokumen	
		6850.EBA.957	Layanan Hukum			5	Laporan	
			Indikator RO :					
			01	Nilai Evaluasi Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH		90	Nilai	-layanan audit internal
			Komponen Input :					
	Provinsi		201	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi		1	Laporan	
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Provinsi		202	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait pemilihan	1	Laporan	
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Provinsi		203	Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan kajian hukum	1	Laporan	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Kab/kota		301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	6	Laporan	

Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Kab/kota		302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	6	Laporan	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum
		6850.EBA.962	Layanan Umum			2	Dokumen	
			Indikator RO :					
			01	Persentase penyelenggaraan dukungan administrasi dan ketatausahaan Bawaslu		100	%	-layanan audit internal
			Komponen Input :					
Ketua Provinsi	Provinsi		201	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	1	Laporan	
Ketua Kab/Kota	Kab/kota		301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan	
		6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum			3	Laporan	
			Indikator RO :					
			01	Persentase pemenuhan pemberian bantuan hukum Bawaslu		100	%	-layanan audit internal
			Komponen Input :					
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Provinsi		201	Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Provinsi		202	Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan	Pelatihan, Sosialisasi, peningkatan kapasitas, jasa konsultan, penyelesaian kasus hukum
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Kab/kota		301	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	6	Laporan	Hanya paket jasa konsultan (advokat)
		6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			175	Orang, Layanan	
		6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM			175	Orang	
			Indikator RO :					
			01	ASN Profesional		60	Nilai	-layanan audit internal
			Komponen Input :					
SDM, Organisasi, dan Diklat	Provinsi		201	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparaturnya pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	25	Orang	Seluruh pegawai provinsi
SDM, Organisasi, dan Diklat	Kab/kota		301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparaturnya pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	150	Orang	Seluruh pegawai kabupaten/kota